



Pengaruh Tata Kelola Kolaboratif terhadap Keberhasilan Program Pembangunan Berkelanjutan di Kawasan Pesisir Makassar

Natsir Mallawi

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Yappi Makassar, Indonesia

Korespondensi Penulis: Natsirmallawi01@gmail.com

Abstract. Sustainable development in coastal areas requires collaborative governance involving multiple stakeholders, including government, private sector, and communities. Makassar, as a major coastal city in Eastern Indonesia, faces significant challenges in implementing sustainable development programs in its coastal areas. This study examines the influence of collaborative governance on the success of sustainable development programs in Makassar's coastal areas, with a focus on accountability mechanisms and stakeholder engagement processes. This research employs a mixed-method approach, combining quantitative analysis using Structural Equation Modeling (SEM) and qualitative analysis through in-depth interviews with 150 respondents from government agencies, private sector, NGOs, and local communities. Data were collected from January to October 2024 in four coastal sub-districts of Makassar. The study reveals that collaborative governance significantly influences the success of sustainable development programs ($\beta = 0.687, p < 0.001$). Key mediating factors include transparency in resource allocation ($\beta = 0.445, p < 0.01$), community participation in decision-making ($\beta = 0.523, p < 0.001$), and integrated monitoring systems ($\beta = 0.398, p < 0.05$). Effective collaborative governance enhances sustainable development program outcomes through improved accountability, resource efficiency, and stakeholder satisfaction. The findings suggest that formal collaboration frameworks and transparent financial reporting mechanisms are critical success factors.

Keywords: collaborative governance, sustainable development, coastal management, accountability, stakeholder engagement, Makassar.

Abstrak. Pembangunan berkelanjutan di kawasan pesisir memerlukan tata kelola kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Makassar, sebagai kota pesisir utama di Indonesia Timur, menghadapi tantangan signifikan dalam mengimplementasikan program pembangunan berkelanjutan di kawasan pesisirnya. Penelitian ini mengkaji pengaruh tata kelola kolaboratif terhadap keberhasilan program pembangunan berkelanjutan di kawasan pesisir Makassar, dengan fokus pada mekanisme akuntabilitas dan proses keterlibatan pemangku kepentingan. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed-method, mengombinasikan analisis kuantitatif menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) dan analisis kualitatif melalui wawancara mendalam dengan 150 responden dari instansi pemerintah, sektor swasta, LSM, dan masyarakat lokal. Data dikumpulkan dari Januari hingga Oktober 2024 di empat kecamatan pesisir Makassar. Penelitian menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan program pembangunan berkelanjutan ($\beta = 0,687, p < 0,001$). Faktor mediasi utama meliputi transparansi dalam alokasi sumber daya ($\beta = 0,445, p < 0,01$), partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ($\beta = 0,523, p < 0,001$), dan sistem monitoring terintegrasi ($\beta = 0,398, p < 0,05$). Tata kelola kolaboratif yang efektif meningkatkan hasil program pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan akuntabilitas, efisiensi sumber daya, dan kepuasan pemangku kepentingan. Temuan menunjukkan bahwa kerangka kolaborasi formal dan mekanisme pelaporan keuangan yang transparan merupakan faktor kunci keberhasilan.

Kata kunci: tata kelola kolaboratif, pembangunan berkelanjutan, pengelolaan pesisir, akuntabilitas, keterlibatan pemangku kepentingan, Makassar.

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Kawasan pesisir Makassar menghadapi tekanan pembangunan yang meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi. Sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar memiliki 14 kilometer garis pantai yang menjadi pusat aktivitas ekonomi, pariwisata, dan permukiman. Namun, pembangunan yang tidak terkendali telah menimbulkan berbagai

permasalahan lingkungan seperti abrasi pantai, pencemaran air laut, dan kerusakan ekosistem mangrove.

Program pembangunan berkelanjutan di kawasan pesisir memerlukan pendekatan tata kelola yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kompleksitas permasalahan pesisir tidak dapat diselesaikan oleh satu institusi saja, melainkan membutuhkan kolaborasi yang efektif antara pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat lokal.

Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

Konsep Tata Kelola Kolaboratif

Ansell & Gash (2018) mendefinisikan collaborative governance sebagai "pengaturan pemerintahan di mana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi konsensus, dan deliberatif." Konsep ini telah berkembang pesat, khususnya dalam konteks manajemen bencana dan pembangunan berkelanjutan (Dai et al., 2024).

Dalam konteks akuntansi sektor publik, tata kelola kolaboratif mencakup empat dimensi utama:

- **Transparansi Finansial:** Keterbukaan informasi anggaran dan realisasi program
- **Akuntabilitas Vertikal:** Pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat dan daerah
- **Akuntabilitas Horizontal:** Pertanggungjawaban kepada masyarakat dan stakeholder
- **Partisipasi dalam Perencanaan:** Keterlibatan stakeholder dalam penyusunan anggaran

Robbins & Coulter (2018) menekankan bahwa collaborative governance menjadi kunci keberhasilan implementasi program-program pembangunan berkelanjutan, khususnya di wilayah yang kompleks seperti kawasan pesisir. Zhang et al. (2024) lebih lanjut menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif dalam konteks manajemen pesisir terintegrasi (ICZM) memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dari perspektif hukum lingkungan internasional.

Pembangunan Berkelanjutan di Kawasan Pesisir

Pembangunan berkelanjutan di kawasan pesisir mengintegrasikan tiga pilar utama: ekonomi, sosial, dan lingkungan (Brundtland Commission, 1987). Konsep ini telah berkembang menjadi paradigma ekonomi biru (blue economy) yang menekankan pada pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut sambil menjaga kesehatan ekosistem laut (Spenger et al., 2024).

Dimensi Ekonomi: Peningkatan pendapatan masyarakat pesisir, pengembangan ekonomi biru (blue economy), dan efisiensi penggunaan sumber daya. European Commission (2024) melaporkan bahwa ekonomi biru Uni Eropa mempekerjakan 3,6 juta orang dengan omzet hampir €624 miliar pada tahun 2021. Keen et al. (2018) mengembangkan kerangka konseptual untuk menilai pengelolaan laut berkelanjutan dalam konteks ekonomi biru.

Dimensi Sosial: Peningkatan kualitas hidup masyarakat, pemerataan akses terhadap sumber daya, dan penguatan modal sosial. Macdonald et al. (2022) menekankan pentingnya menempatkan masyarakat pesisir sebagai pusat ekonomi biru berkelanjutan untuk memastikan keadilan sosial.

Dimensi Lingkungan: Konservasi ekosistem pesisir, mitigasi perubahan iklim, dan pengelolaan limbah dan pencemaran. Rölfer & Celliers (2022) menunjukkan bahwa resiliensi sosial-ekologis menjadi kunci dalam navigasi antara stabilitas dan transformasi dalam tata kelola pesisir.

Stakeholder Theory dalam Tata Kelola Kolaboratif

Freeman (1984) mengembangkan stakeholder theory yang menekankan pentingnya mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terkena dampak kegiatan organisasi. Freeman et al. (2020) menunjukkan bahwa implementasi stakeholder theory dalam praktik tata kelola kolaboratif dapat meningkatkan kinerja program pembangunan berkelanjutan hingga 40%.

Penelitian terkini menunjukkan bahwa keterlibatan stakeholder dalam tata kelola lingkungan memberikan dampak positif yang signifikan. Newig et al. (2023) melalui meta-analisis terhadap 305 studi kasus membuktikan bahwa partisipasi stakeholder meningkatkan efektivitas tata kelola lingkungan, dengan delegasi kekuasaan kepada partisipan sebagai prediktor yang paling andal untuk outcomes yang positif.

Li et al. (2024) menekankan bahwa keterlibatan stakeholder dalam perlindungan lanskap sangat penting untuk pengambilan keputusan yang sukses dan tata kelola yang baik. Kujala et al. (2022) dalam tinjauan komprehensif terhadap 90 artikel menunjukkan bahwa stakeholder engagement telah berkembang menjadi konstruk yang luas namun seringkali tidak jelas dalam penelitian bisnis dan masyarakat.

Dalam konteks tata kelola kolaboratif, teori ini relevan karena mengakui legitimasi stakeholder untuk mempengaruhi keputusan, mengenali kekuatan stakeholder, dan memahami tingkat urgensi tuntutan stakeholder.

Teori Akuntabilitas Publik

Gray et al. (2019) mengembangkan framework akuntabilitas publik yang mencakup: transparansi (keterbukaan informasi), answerability (kemampuan memberikan penjelasan), controllability (kemampuan mengendalikan tindakan), dan responsibility (tanggung jawab atas outcomes).

Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, hipotesis penelitian ini adalah:

- H1: Tata kelola kolaboratif berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan program pembangunan berkelanjutan di kawasan pesisir Makassar
- H2: Transparansi finansial memediasi hubungan antara tata kelola kolaboratif dan keberhasilan program pembangunan berkelanjutan
- H3: Partisipasi stakeholder memediasi hubungan antara tata kelola kolaboratif dan keberhasilan program pembangunan berkelanjutan
- H4: Sistem monitoring terintegrasi memediasi hubungan antara tata kelola kolaboratif dan keberhasilan program pembangunan berkelanjutan

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- Menganalisis pengaruh tata kelola kolaboratif terhadap keberhasilan program pembangunan berkelanjutan di kawasan pesisir Makassar
- Mengidentifikasi faktor-faktor mediasi dalam hubungan tersebut
- Merumuskan model tata kelola kolaboratif yang efektif untuk program pembangunan berkelanjutan di kawasan pesisir

2. METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed-method dengan explanatory sequential design. Fase kuantitatif dilakukan untuk menguji hipotesis, diikuti fase kualitatif untuk memberikan penjelasan mendalam atas temuan kuantitatif.

Populasi dan Sampel

Populasi: Seluruh stakeholder yang terlibat dalam program pembangunan berkelanjutan di kawasan pesisir Makassar, mencakup:

- Pemerintah daerah (BAPPEDA, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan dan Perikanan)
- Sektor swasta (developer, pelaku usaha pariwisata)
- Organisasi masyarakat sipil (NGO, LSM lingkungan)
- Masyarakat pesisir

Sampel: 150 responden yang dipilih menggunakan stratified random sampling dengan alokasi:

- Pemerintah: 45 responden (30%)
- Sektor swasta: 30 responden (20%)
- NGO/LSM: 30 responden (20%)
- Masyarakat: 45 responden (30%)

Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di empat kecamatan pesisir Makassar:

- Kecamatan Tamalate
- Kecamatan Mariso
- Kecamatan Ujung Tanah
- Kecamatan Tallo

Variabel dan Operasionalisasi

Variabel Independen: Tata Kelola Kolaboratif

Dimensi Struktur Kelembagaan ($\alpha = 0.856$):

- Kejelasan mekanisme koordinasi
- Pembagian peran dan tanggung jawab
- Forum komunikasi multi-stakeholder

Dimensi Proses Kolaborasi ($\alpha = 0.792$):

- Frekuensi interaksi
- Kualitas komunikasi
- Mekanisme penyelesaian konflik

Dimensi Kapasitas Kolaboratif ($\alpha = 0.834$):

- Kompetensi SDM
- Ketersediaan sumber daya
- Kemampuan teknis

Variabel Dependen: Keberhasilan Program Pembangunan Berkelanjutan

Dimensi Outcome Ekonomi ($\alpha = 0.778$):

- Peningkatan pendapatan masyarakat
- Pertumbuhan UMKM pesisir
- Efisiensi anggaran program

Dimensi Outcome Sosial ($\alpha = 0.823$):

- Peningkatan kualitas hidup
- Penguatan modal sosial
- Akses terhadap layanan publik

Dimensi Outcome Lingkungan ($\alpha = 0.867$):

- Kualitas air laut
- Luas tutupan mangrove
- Pengurangan emisi karbon

Variabel Mediasi

Transparansi Finansial ($\alpha = 0.845$):

- Keterbukaan informasi anggaran
- Publikasi laporan keuangan
- Akses data realisasi program

Partisipasi Stakeholder ($\alpha = 0.789$):

- Keterlibatan dalam perencanaan
- Partisipasi dalam implementasi
- Keterlibatan dalam evaluasi

Sistem Monitoring Terintegrasi ($\alpha = 0.812$):

- Pengumpulan data real-time
- Sistem pelaporan terintegrasi
- Tracking indikator kinerja

Instrumen Penelitian

Kuesioner

Kuesioner menggunakan skala Likert 5 poin (1 = sangat tidak setuju, 5 = sangat setuju). Validitas instrumen diuji menggunakan confirmatory factor analysis (CFA), dengan loading factor minimal 0.5. Reliabilitas diuji menggunakan Cronbach's Alpha dengan standar minimal 0.7.

Panduan Wawancara

Panduan wawancara semi-terstruktur dikembangkan untuk eksplorasi mendalam tentang:

- Mekanisme tata kelola kolaboratif yang diterapkan
- Kendala dalam implementasi program
- Best practices dalam kolaborasi multi-stakeholder

Teknik Analisis Data

Analisis Kuantitatif

- Analisis Deskriptif: Untuk menggambarkan karakteristik responden dan variabel penelitian
- Confirmatory Factor Analysis (CFA): Untuk validasi model pengukuran
- Structural Equation Modeling (SEM): Menggunakan AMOS 24.0 untuk menguji hipotesis dan efek mediasi

Kriteria Model Fit:

- $\text{Chi-square/df} \leq 3.0$
- $\text{RMSEA} \leq 0.08$
- $\text{CFI} \geq 0.90$
- $\text{TLI} \geq 0.90$
- $\text{SRMR} \leq 0.08$

Analisis Kualitatif

Analisis tematik menggunakan framework Braun & Clarke (2019):

- Familiarization with data
- Generating initial codes
- Searching for themes
- Reviewing themes

- Defining and naming themes
- Producing the report

Uji Asumsi SEM

- Normalitas: Skewness dan kurtosis dalam rentang ± 2.58
- Outliers: Mahalanobis distance $< \chi^2(0.001, df)$
- Multicollinearity: VIF < 10
- Linearity: Scatterplot analysis

3. HASIL PENELITIAN

Karakteristik Responden

Tabel 1. Karakteristik Responden

Karakteristik	Kategori	Frekuensi	Persentase
Jenis Kelamin	Laki-laki	82	54.7%
	Perempuan	68	45.3%
Usia	25-35 tahun	45	30.0%
	36-45 tahun	58	38.7%
	46-55 tahun	35	23.3%
	>55 tahun	12	8.0%
Pendidikan	SMA/ sederajat	23	15.3%
	Diploma	31	20.7%
	Sarjana	72	48.0%
	Pascasarjana	24	16.0%
Pengalaman Kerja	<5 tahun	28	18.7%
	5-10 tahun	52	34.7%
	11-20 tahun	48	32.0%
	>20 tahun	22	14.7%

Analisis Deskriptif Variabel

Tabel 2. Analisis Deskriptif Variabel

Variabel	Mean	Std. Deviation	Kategori
Tata Kelola Kolaboratif	3.68	0.624	Baik
Transparansi Finansial	3.45	0.752	Cukup Baik
Partisipasi Stakeholder	3.72	0.689	Baik
Sistem Monitoring	3.41	0.793	Cukup Baik
Keberhasilan Program	3.59	0.671	Baik

Uji Validitas dan Reliabilitas

Confirmatory Factor Analysis (CFA)

Model Fit Indices:

- $\chi^2/df = 2.847$ (acceptable)
- RMSEA = 0.072 (good fit)
- CFI = 0.928 (good fit)
- TLI = 0.915 (good fit)
- SRMR = 0.065 (good fit)

Factor Loading: Seluruh indikator memiliki factor loading > 0.5, dengan rentang 0.567 - 0.856.

Reliabilitas Konstruk

Tabel 3. Reliabilitas Konstruk

Konstruk	Cronbach's Alpha	Composite Reliability	AVE
Tata Kelola Kolaboratif	0.879	0.884	0.558
Transparansi Finansial	0.845	0.851	0.653
Partisipasi Stakeholder	0.789	0.795	0.565
Sistem Monitoring	0.812	0.818	0.598
Keberhasilan Program	0.856	0.862	0.613

Uji Hipotesis

Model Struktural

Model Fit Indices:

- $\chi^2/df = 2.934$ (acceptable)
- RMSEA = 0.074 (good fit)
- CFI = 0.921 (good fit)
- TLI = 0.908 (acceptable)
- SRMR = 0.068 (good fit)

Hasil Pengujian Hipotesis

Tabel 4. Reliabilitas Konstruk

Hipotesis	Path	β	t-value	p-value	Hasil
H1	TKK → KP	0.687	8.234***	<0.001	Diterima
H2	TKK → TF → KP	0.445	3.675**	0.007	Diterima
H3	TKK → PS → KP	0.523	4.892***	<0.001	Diterima
H4	TKK → SM → KP	0.398	2.876**	0.021	Diterima

*** $p < 0.001$; ** $p < 0.05$

Keterangan: TKK = Tata Kelola Kolaboratif; KP = Keberhasilan Program; TF = Transparansi Finansial; PS = Partisipasi Stakeholder; SM = Sistem Monitoring

Analisis Mediasi

Uji Efek Mediasi (Sobel Test)

Tabel 5. Uji Efek Mediasi (Sobel Test)

Variabel Mediasi	Direct Effect	Indirect Effect	Total Effect	Sobel Z	p-value
Transparansi Finansial	0.687***	0.198**	0.885***	3.124	0.002
Partisipasi Stakeholder	0.687***	0.236***	0.923***	4.567	<0.001
Sistem Monitoring	0.687***	0.158*	0.845***	2.234	0.025

*** $p < 0.001$; ** $p < 0.01$; * $p < 0.05$

Temuan Kualitatif

Tema 1: Pentingnya Institutional Framework

Berdasarkan wawancara dengan informan kunci, ditemukan bahwa:

"Koordinasi antar-lembaga menjadi kunci utama. Ketika BAPPEDA, Dinas LH, dan Dinas Kelautan berkolaborasi dengan baik, program berjalan lebih efektif." (Informan G1 - Kepala BAPPEDA)

"Forum komunikasi rutin setiap bulan membantu kami menyelesaikan masalah sebelum menjadi konflik besar." (Informan N1 - Direktur NGO)

Tema 2: Transparansi sebagai Trust Builder

"Keterbukaan data anggaran membuat masyarakat lebih percaya. Mereka bisa melihat kemana uang dialokasikan." (Informan G2 - Kepala Dinas LH)

"Laporan keuangan yang dipublikasikan online meningkatkan akuntabilitas program." (Informan S1 - CEO Perusahaan Swasta)

Tema 3: Challenges dalam Kolaborasi

"Perbedaan kepentingan sering menjadi hambatan. Swasta fokus profit, NGO fokus konservasi, pemerintah fokus pertumbuhan." (Informan N2 - Aktivis Lingkungan)

"Kapasitas teknis masyarakat pesisir masih terbatas untuk terlibat dalam perencanaan yang detail." (Informan M1 - Ketua RT).

4. PEMBAHASAN

Pengaruh Tata Kelola Kolaboratif terhadap Keberhasilan Program

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan program pembangunan berkelanjutan ($\beta = 0.687$, $p < 0.001$). Temuan ini konsisten dengan penelitian Ansell & Gash (2018) yang menunjukkan bahwa collaborative governance meningkatkan efektivitas program publik. Studi meta-analisis oleh Newig et al. (2019) terhadap 305 kasus pengambilan keputusan lingkungan juga mengkonfirmasi bahwa partisipasi memiliki dampak positif pada outcomes tata kelola lingkungan.

Dalam konteks kawasan pesisir Makassar, tata kelola kolaboratif memberikan beberapa manfaat:

- Pooling Resources: Kombinasi sumber daya dari berbagai stakeholder meningkatkan kapasitas implementasi program
- Knowledge Integration: Integrasi pengetahuan lokal masyarakat dengan expertise teknis pemerintah dan swasta
- Legitimacy Enhancement: Keterlibatan stakeholder meningkatkan legitimasi dan dukungan terhadap program

Temuan ini sejalan dengan penelitian Rölfer et al. (2024) yang menunjukkan bahwa kolaborasi, pertukaran pengetahuan, dan agensi stakeholder berperan penting dalam meningkatkan resiliensi iklim dalam tata kelola pesisir.

Peran Transparansi Finansial sebagai Mediator

Transparansi finansial terbukti memediasi hubungan antara tata kelola kolaboratif dan keberhasilan program ($\beta = 0.445$, $p < 0.01$). Hal ini sejalan dengan Gray et al. (2019) yang menekankan transparency sebagai fondasi akuntabilitas publik.

Mekanisme transparansi yang efektif di Makassar meliputi:

- Publikasi anggaran program secara online
- Laporan progress bulanan yang accessible
- Audit partisipatif melibatkan masyarakat

Pentingnya Partisipasi Stakeholder

Partisipasi stakeholder menunjukkan efek mediasi terkuat ($\beta = 0.523$, $p < 0.001$). Freeman et al. (2020) mengargumentasikan bahwa meaningful participation meningkatkan ownership dan sustainability program. Temuan ini diperkuat oleh penelitian Newig et al. (2023) yang melalui meta-analisis 305 studi kasus membuktikan bahwa delegasi kekuasaan kepada partisipan merupakan prediktor yang paling andal untuk outcomes lingkungan yang positif.

Li et al. (2024) dalam systematic literature review menunjukkan bahwa keterlibatan stakeholder dalam perlindungan lanskap sangat penting untuk transparansi, akuntabilitas, dan legitimasi yang mengarah pada tata kelola lingkungan yang lebih efektif. Kujala et al. (2022) menekankan bahwa stakeholder engagement mencakup komponen moral, strategis, dan pragmatis yang mempengaruhi tujuan, aktivitas, dan dampak program.

Level partisipasi di Makassar bervariasi:

- Consultation: Pengumpulan input melalui public hearing
- Involvement: Keterlibatan dalam working group
- Collaboration: Joint decision-making dalam steering committee
- Empowerment: Delegasi authority pada community-based organization

Penelitian Newig et al. (2019) menunjukkan bahwa jalur kausal partisipasi mempengaruhi outcomes lingkungan melalui mediasi konvergensi perspektif stakeholder dan capacity building stakeholder.

Sistem Monitoring Terintegrasi

Sistem monitoring terintegrasi juga berperan sebagai mediator ($\beta = 0.398$, $p < 0.05$). Digital dashboard yang dikembangkan Pemerintah Kota Makassar memungkinkan real-time tracking progress program.

Fitur unggulan sistem monitoring:

- Online reporting dari field officers
- GPS-based verification
- Community reporting mechanism
- Automated alert system

Implikasi Teoritis

Kontribusi pada Stakeholder Theory

Penelitian ini memperkaya stakeholder theory dengan menunjukkan bahwa:

- **Dynamic Stakeholder Saliency:** Pentingnya stakeholder dapat berubah selama lifecycle program
- **Stakeholder Integration Mechanisms:** Formal mechanisms lebih efektif daripada ad-hoc consultation
- **Accountability Networks:** Akuntabilitas dalam collaborative governance bersifat multi-directional

Temuan ini mengkonfirmasi penelitian Kujala et al. (2022) yang menunjukkan bahwa stakeholder engagement mencakup komponen moral, strategis, dan pragmatis yang saling berinteraksi. Li et al. (2024) lebih lanjut menekankan bahwa keterlibatan stakeholder berdasarkan prinsip inklusivitas, kesetaraan, dan keadilan sosial memastikan berbagai perspektif terintegrasi dalam proses pengambilan keputusan.

Pengembangan Teori Akuntabilitas Publik

Temuan penelitian mengusulkan expanded framework akuntabilitas publik yang mencakup:

- **Collaborative Accountability:** Shared responsibility among stakeholders
- **Adaptive Accountability:** Flexibility in accountability mechanisms
- **Digital Accountability:** Technology-enabled transparency and monitoring

Kontribusi ini sejalan dengan penelitian Rölfer & Celliers (2022) yang mengembangkan lima langkah dan tiga jenis pengetahuan (sistem, target, transformatif) untuk mengintegrasikan resiliensi sosial-ekologis dalam tata kelola pesisir.

Kontribusi pada Blue Economy Framework

Penelitian ini juga berkontribusi pada pengembangan kerangka ekonomi biru berkelanjutan. Spenger et al. (2024) membedakan antara pembangunan berkelanjutan kuat dan lemah dalam ekonomi biru, sementara European Commission (2024) menunjukkan bahwa sektor-sektor yang muncul seperti energi laut, bioteknologi biru, dan desalinasi memimpin pertumbuhan dan menciptakan peluang bisnis baru. Temuan penelitian ini memperkuat argumen bahwa tata kelola kolaboratif merupakan kunci untuk mencapai ekonomi biru yang berkelanjutan.

Implikasi Praktis

Untuk Policymakers

- **Institutional Design:** Perlu membentuk formal collaboration framework dengan clear mandate dan funding
- **Capacity Building:** Investasi dalam pelatihan collaborative leadership untuk government officials
- **Technology Infrastructure:** Pengembangan integrated digital platform untuk transparency dan monitoring

Untuk Practitioners

- **Stakeholder Mapping:** Regular assessment stakeholder salience dan interest
- **Communication Strategy:** Multi-channel communication untuk different stakeholder groups
- **Conflict Resolution:** Proactive conflict management melalui mediation dan negotiation

Keterbatasan Penelitian

- Scope geografis terbatas pada Makassar, sehingga generalizability terbatas
- Time frame cross-sectional tidak menangkap dynamic changes
- Self-reported data dalam kuesioner berpotensi social desirability bias
- Complex stakeholder relationships sulit sepenuhnya dikapture segment dalam quantitative model

5. KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

Tata kelola kolaboratif berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan program pembangunan berkelanjutan di kawasan pesisir Makassar. Hal ini menunjukkan pentingnya multi-stakeholder approach dalam pengelolaan kawasan pesisir.

Transparansi finansial, partisipasi stakeholder, dan sistem monitoring terintegrasi berperan sebagai mediator dalam hubungan tersebut. Partisipasi stakeholder menunjukkan efek mediasi terkuat, menekankan importance of meaningful engagement.

Model tata kelola kolaboratif yang efektif memerlukan institutional framework yang jelas, mekanisme transparansi yang robust, dan sistem monitoring berbasis teknologi.

Challenges utama dalam implementasi meliputi perbedaan kepentingan stakeholder, keterbatasan kapasitas teknis, dan koordinasi antar-lembaga.

Saran

Saran Teoretis

- Penelitian longitudinal untuk memahami evolusi collaborative governance dalam jangka panjang
- Comparative study dengan kota pesisir lain untuk generalizability findings
- Integration teori institutional economics untuk memahami transaction costs dalam collaborative governance

Saran Praktis

Untuk Pemerintah Kota Makassar:

- Membentuk Coastal Collaborative Council dengan representasi proporsional semua stakeholder
- Mengembangkan Coastal Sustainability Index untuk monitoring progress secara comprehensive
- Implementasi blockchain technology untuk enhanced transparency dalam financial management

Untuk Stakeholder Non-Pemerintah:

- Capacity building programs untuk meningkatkan technical competence
- Establishing sectoral working groups untuk focused collaboration
- Regular stakeholder forum untuk maintaining relationship dan trust

Saran Kebijakan

- Regulasi tentang collaborative governance di level provinsi dan nasional
- Incentive mechanism untuk encouraging private sector participation
- Integration dengan SDGs implementation untuk global alignment

Agenda Penelitian Mendatang

- Longitudinal impact assessment collaborative governance implementation
- Cost-benefit analysis different governance models
- Role of technology dalam transforming collaborative governance
- Cultural and contextual factors yang mempengaruhi collaboration effectiveness

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2018). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543-571.
- Braun, V., & Clarke, V. (2019). Reflecting on reflexive thematic analysis. *Qualitative Research in Sport, Exercise and Health*, 11(4), 589-597.
- Brundtland Commission. (1987). *Our common future: Report of the world commission on environment and development*. Oxford University Press.
- Celliers, L., Rölfer, L., Llano, E., & Ojea, E. (2021). An integrated assessment of climate change adaptation pathways for coastal management in the Eastern Baltic Sea. *Ambio*, 50(11), 2060-2075.
- Dai, L., Wu, Q., & Liu, H. (2024). Collaborative governance in disaster management and sustainable development. *Public Administration and Development*, 44(2), 125-140.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1-29.
- European Commission. (2024). *EU Blue Economy report 2024: Innovation and sustainability drive growth*. European Commission.
- Fan, Y., Chen, J., Shirkey, G., John, R., Wu, S. R., Park, H., & Shao, C. (2016). Applications of structural equation modeling (SEM) in ecological studies: An updated review. *Ecological Processes*, 5(1), 1-12.
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic management: A stakeholder approach*. Pitman.
- Freeman, R. E., Harrison, J. S., Wicks, A. C., Parmar, B. L., & De Colle, S. (2020). *Stakeholder theory: The state of the art*. Cambridge University Press.
- Gray, A., Jenkins, B., & Segsworth, B. (2019). *Budgeting, auditing, and evaluation: Functions and integration in seven governments*. Routledge.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2019). *Multivariate data analysis* (8th ed.). Cengage Learning.
- Hair, J. F., Risher, J. J., Sarstedt, M., & Ringle, C. M. (2019). When to use and how to report the results of PLS-SEM. *European Business Review*, 31(1), 2-24.
- Keen, M. R., Schwarz, A. M., & Wini-Simeon, L. (2018). Towards defining the blue economy: Practical lessons from pacific ocean governance. *Marine Policy*, 88, 333-341.
- Kujala, J., Sachs, S., Leinonen, H., Heikkinen, A., & Laude, D. (2022). Stakeholder engagement: Past, present, and future. *Business & Society*, 61(5), 1136-1196.
- Lei, P. W., & Wu, Q. (2010). Structural equation modeling in medical research: A primer. *BMC Research Notes*, 3(1), 267.

- Li, Y., Abu Bakar, N. A., Ismail, N. A., Ariffin, N. F. M., & Mundher, R. (2024). Stakeholder involvement and preferences in landscape protection decision-making: A systematic literature review. *Frontiers in Communication*, 9, 1340026.
- Macdonald, H. I., McKinley, E., Rees, S. E., Dickens, B., & Le Tissier, M. (2022). Putting coastal communities at the center of a sustainable blue economy: A review of risks, opportunities, and strategies. *Frontiers in Political Science*, 4, 1032204.
- Mulazzani, L., Curtin, R., & Malorgio, G. (2016). Blue growth and ecosystem services. *Marine Policy*, 85, 17-24.
- Newig, J., Koontz, T. M., & Kuhn, K. (2023). Does stakeholder participation improve environmental governance? Evidence from a meta-analysis of 305 case studies. *Global Environmental Change*, 81, 102717.
- Newig, J., Schulz, D., Fischer, D., Hetze, K., Laws, N., Lüdecke, G., & Rieckmann, M. (2019). Pathways to implementation: Evidence on how participation in environmental governance impacts on environmental outcomes. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 30(3), 383-399.
- Patil, P. G., Virdin, J., Diez, S. M., Roberts, J., & Singh, A. (2016). Toward a blue economy: A promise for sustainable growth in the Caribbean. World Bank Group.
- Robbins, S. P., & Coulter, M. (2018). *Management* (14th ed.). Pearson.
- Roberts, J., & Ali, A. (2016). The blue economy and small states. Commonwealth Secretariat.
- Rölfer, L., Celliers, L., & Abson, D. J. (2022). Resilience and coastal governance: Knowledge and navigation between stability and transformation. *Ecology and Society*, 27(2), 40.
- Rölfer, L., Celliers, L., Fernandes, M., Berbel, J., & Martínez, F. (2024). Assessing collaboration, knowledge exchange, and stakeholder agency in coastal governance to enhance climate resilience. *Regional Environmental Change*, 24(1), 6.
- Salihoglu, B., Yücel, M., Uygurer, P., Yücel, E. Ş., Papathanassiou, E., Tezcan, D., ... & Kobaidze, S. (2024). Implementing regional blue economy research and innovation strategies: A case study for the Black Sea. *Frontiers in Marine Science*, 11, 1409689.
- Soma, K., Nielsen, K. N., Attwood, S., Cheung, W. W., Cisneros-Montemayor, A. M., Dey, M. M., ... & Naylor, R. L. (2018). Achieving a blue transformation: Learning from marine economics. *Nature Sustainability*, 1(1), 10-17.
- Spenger, C., Saldivia Gonzatti, I., Kröger, L., Hinkel, J., Möllmann, C., & Schmidt, J. O. (2024). Strong versus weak sustainable development in the blue economy: A study of 15 EU coastal countries. *npj Ocean Sustainability*, 3(1), 48.
- United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development*. UN General Assembly Resolution A/RES/70/1.
- van den Burg, S. W., Aguilar-Manjarrez, J., Jenness, J., & Torrie, M. (2019). Assessment of the geographical potential for co-use of marine space, based on operational boundaries for Blue Growth sectors. *Marine Policy*, 100, 43-57.

Zhang, S., Wu, Q., Butt, M. J., Lv, Y. M., & Wang, Y. E. (2024). Coastal cities governance in the context of integrated coastal zonal management: A sustainable development goal perspective under international environmental law for 'coastal sustainability'. *Frontiers in Marine Science*, 11, 1364554.